## ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### **SKRIPSI**

**OLEH** 

RAJA RISA ELVIRA NIM : 17622088



# ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

RAJA RISA ELVIRA NIM: 17622088

PROGRAM STUDI: S1 AKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG 2021

## TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan kepada:

Panitia Komisi Ujian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PEMBANGUNAN Tanjungpinang

Oleh

RAJA RISA ELVIRA NIM : 17622088

Menyetujui

Pembimbinga Pertama,

Pembimbing Kedua,

BAMBANG SAMBODO, SE, M.Ak

NIDN. 8833900016 / Asisten Ahli

BUDI ZUMFACHRI, S.Si., M.Si

NIDN. 1028 067301 / Asisten Ahli

Mengetahui,

tua Program Studi,

ENDY SATRIA, SE., M.Ak

NIDN, 1015069101 / Lektor

#### Skripsi Berjudul

#### ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

RAJA RISA ELVIRA 17622088

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Dua November Dua Ribu Dua Puluh Satu dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Bambang Sambodo, SE., M. Ak

NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Hendy Satria, SE., M.Ak

NIDN.1015069101/Lektor

Anggota,

Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si.CA

NIDN.1020037101/Lektor

Tanjungpinang, 22 November 2021

Sekolah Tinggi Ilma Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,

Ketua

wardinda,SE.,M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801/Lektor

#### PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raja Risa Elvira

Nim : 17622088

Tahun Angkatan : 2017

Indeks Prestasi Komulatif : 3,56

Program Studi / jenjang : AKUNTANSI

Judul Skripsi :Analisa Implemetansi Sakip Dan Lakip Tahun

2019 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan meteri dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu. Maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 22 November 2021

Penyusun

y k.m.

17622088

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

#### Bismilahhirahmanirahim

Alhamdulillahhiraabilalamin puji syukur ku persembahan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Raja Muhammad Aziz bin Raja Hasan (Almarhum) abah janji abah sudah cha penuhi sekarang icha sudah menjadi sarjana, cha berdoa sama allah semoga abah yang tenang disana icha akan wujudkan cita-cita abah. Terima kasih abah sudah mau jadi ayah yang terbaik. Anak kebanggaan abah sama mama.

Cha juga akan jaga mama sampai icha tua, cha akan menjadi anak yang berbakti sama mama, cha sudah ikhlaskan abah. Cha akan jadi anak yang sukses buat abah dan mama

#### Al-Fatihah

#### **MOTTO**

#### DENGAN SATU NIAT AKU PASTI BISA

## 

#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahamtullahiwabarakatuh

Puji syukur Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU" ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Shalawat serta salam semoga senantisa tercurahkan kepada Rasullah SAW.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut.

- Ibu Charly Marlinda, SE . M. Ak. Ak. CA Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang
- 2. Ibu Ranti Utami, SE. Ak ., M.Si. ,CA selaku wakil ketua I dan III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
- 3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- 4. Bapak Imran Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- Bapak Hendy Satria , SE,M.Ak selaku ketua prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Bambang Sambodo, SE., M.Ak selaku pembimbing I saya yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya agar dapat menyusun

skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Budi Zulfachri, S.Si., M.Si selaku Pembimbing II saya yang telah

bersedia waktu untuk membimbing saya agar dapat menyusun skripsi ini

dengan baik.

3. Seluruh Dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan

Tanjungpinang.

9. Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah provinsi Kepulauan Riau.

Khususnya staff bagian evaluasi yang telah sangat membantu saya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk Ibu Rina, Atok Matsiwa, yang telah mendukung dan mempermudah

risa dalam menyelesaikan skripsi. Dan membantu semangat risa saat risa

kehilangan abah kandungku.

Akhir Kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan nya dan semoga bermanfaat bagi kita

semua

Tanjungpinang, 22 November 2021

Penulis

RAJA RISA ELVIRA

17622088

#### **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUDUL
TANDA I	PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYA	TAAN
HALAMA	AN PERSEMBAHAN
MOTTO	
KATA PE	NGANTARvi
DAFTAR	ISIviii
DAFTAR	TABEL xi
DAFTAR	GAMBAR xii
DAFTAR	LAMPIRAN xiii
ABSTRA	Kxiv
ABSTRAC	Txv
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah5
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat Penelitian
	1.5.1 Manfaat Ilmiah5
	1.5.2 Manfaat Praktis6

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
	2.1 Landasan Teori	8
	2.1.1 Organisasi Sektor Publik.	8
	2.1.2 Akuntabilitas Publik.	12
	2.1.3 Kinerja	16
	2.1.4 Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah	
	(SAKIP)	21
	2.1.5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	(LAKIP).	22
	2.2 Kerangka Pemikiran	24
	2.3 Penelitian Terdahulu	24
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	27
	3.1 Jenis Penelitian	27
	3.2 Jenis dan Sumber Data	27
	3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
	3.4 Teknik Pengolahan Data	29
	3.5 Jadwal Penelitian	30
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
	4.1 Gambaran Umum	31
	4.1.1 Profil Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Provinsi Kepulauan Riau	31
	4.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	
	Menengah Provinsi Kepulauan Riau	32

		4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	
		Menengah Provinsi Kepulauan Riau	33
		4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	
		Menengah Provinsi Kepulauan Riau	34
		4.1.5 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil	
		dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	43
		4.1.6 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	44
	4.2	Pembahasan	48
		4.2.1 Perencanaan Kinerja.	48
		4.2.2 Pengukuran Kinerja.	55
		4.2.3 Pelaporan Kinerja.	59
		4.2.4 Evaluasi Kinerja	60
		4.2.5 Capaian Kinerja.	63
BAB V	PEI	NUTUP	64
	5.1	Kesimpulan	64
	5.2	Saran	76
DAFTAR	PUS	TAKA	69

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1	Jadwal Kegiatan	30
Tabel 4. 1	Keadaan Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi, Usaha	
	Kecil dan Menengah Tahun 2019	.43
Tabel 4. 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	49
Tabel 4. 3	Strategis Dan Arah Kebijakan	50
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	51
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Provinsi	
	Kepulauan Riau Tahun 2019	52
Tabel 4. 6	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	54
Tabel 4. 7	Capaian Target Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2019	57
Tabel 4. 8	Jumlah Koperasi Di Provinsi Kepulauan Riau	58
Tabel 4. 9	Jumlah KSP/USP Sehat Di Provinsi Kepulauan Riau	58
Tabel 4. 10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi	
	UKM Provinsi Kepulauan Riau	61
Tabel 4. 11	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Indikator Kinerja Dinas Koperasi	
	UKM Provinsi Kepulauan Riau	61

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2 1	Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kec	il
	dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	35

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Pertanyaan Wawancara

Lampiran II Hasil Wawancara

Lampiran III Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi UKM Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019

Lampiran IV Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019

Lampiran V Template Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

SKPD/Unit Kerja

Lampiran VI Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Dari Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Riau

Lampiran VII Turnitin

Lampiran VIII Curiculum Vitae

#### **ABSTRAK**

## ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### Raja Risa Elvira 17622088 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang rajarisaelvira01@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP dan LAKIP Tahun 2019 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Dimensi penelitian ini yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara kepada pegawai Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Teknik analisis data yang dilakukan teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi SAKIP dan LAKIP Tahun 2019 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan yang meliputi beberapa aspek seperti : Aspek Organisasi itu sendiri, Usaha, SDM dan Akses terhadap Sumberdaya Produktif, sehingga hal ini menyebabkan beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi SAKIP dan LAKIP Tahun 2019 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dan belum sepenuhnya dalam pencapaian target yang telah direncanakan berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Kunci: Organisasi Sektor Publik, Akuntabilitas, Kinerja, SAKIP dan LAKIP

Referensi : Tahun Buku 2010-2019

Jurnal : 9 Jurnal

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, SE, M.Ak

Dosen Pembimbing II : Budi Zulfachri, S.Si, M.Si

#### **ABSTRACT**

## ANALYSIS OF SAKIP AND LAKIP IMPLEMENTATION IN 2019 IN THE SERVICE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS COOPERATIVES IN RIAU ISLANDS

#### Raja Risa Elvira 17622088 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang rajarisaelvira01@gmail.com

This study aims to analyze the implementation of SAKIP and LAKIP in 2019 at the Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives in the Riau Islands Province. The dimensions of this research consist of Performance Planning, Performance Measurement, Performance Reporting, Performance Evaluation and Performance Achievement. This study used descriptive qualitative method. The population in this study were employees of the Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives in the Riau Islands Province.

Data collection was carried out in this study through observation, interviews with employees of the SME Cooperative Service Office of the Riau Islands Province. The technique of data analysis is qualitative analysis techniques.

The results of this study indicate that the implementation of SAKIP and LAKIP in 2019 at the Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives in the Riau Islands Province has been carried out based on applicable regulations. However, in its implementation there are still obstacles that include several aspects such as: Aspects of the Organization itself, Business, Human Resources and Access to Productive Resources, so this causes several performance indicators that have not been achieved.

Based on the results of this study, it can be concluded that the Implementation of SAKIP and LAKIP in 2019 at the SME Cooperative Service of the Riau Islands Province has been carried out and has not fully achieved the planned targets based on the performance indicators to be achieved.

Key: Public Sector Organization, Accountability, Performance, SAKIP and LAKIP

Reference : Fiscal Year 2010-2019

Journal : 9 Journals

Advisor I : Bambang Sambodo, SE, M. Ak

Advisor II : Budi Zulfachri, S.Si, M.Si

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintah lokal yang baik (*Good Local Governance*) diperlukan suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 7
Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan setiap masing-masing instansi.

Dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntunan lingkungan strategis

lokal, nasional dan global dalam tantanan sistem administrasi negara republik indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misi-Nya dengan potensi dan peluang kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sangat penting dalam hal ini untuk melakukan review LAKIP di setiap SKPD agar dapat mengetahui tingkat kesesuaian dan ketepatan penyusunan LAKIP dengan pedoman yang berlaku. Ketidak-konsistenan dan ketidak-tepatan penyusunan LAKIP dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentunya akan berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam pencapaiannya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban berkala.

Dari ketentuan tersebut akuntabilitas adalah yang paling utama mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, untuk kerja mandiri yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dimaksud disampaikan pada atasan masing-masing dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban (value for money) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan tiga elemen yaitu ekonomi,efesiensi dan efektivitas.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki visi-misi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah mulia dan meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal investasi dan pengembangan usaha, mikro, kecil dan menengah." Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan nilai-nilai yang melandasi jalannya pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efesiensi. Visi dan misi tersebut dapat terlaksana apabila mengacu juga pada pedoman yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju kearah (Good Governance and Clean Governace), DKUKM Provinsi Kepulauan Riau harus dapat memposisikan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya dilayani dan mengkhendaki adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah akuntabilitas publik. Dalam hal ini, DKUKM Provinsi Kepulauan Riau harus mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 lima tahun yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dari (Ittner, 2004) mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sistem pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor teknis, meliputi: kesulitan menentukan ukuran kinerja dan keterbatasan sistem informasi; dan faktor organisasional, meliputi: komitmen manajemen, otoritas pembuatan keputusan dan pelatihan. Sedangkan (Wijaya, Citra H Anthonius dan Akbar, 2013) dalam penelitiannya yang berjudul

"pengaruh informasi, tujuan dan sasaran organisasi, dan *external pressure* terhadap penerapan sistem pengukuran kinerja di Indonesia". Hasil dari penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap sistem pengukuran kinerja di Indonesia adalah informasi dan *external pressure*.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu pengemban amanah untuk membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) setiap akhir periode untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Beberapa kendala yang dihadapi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai target penetapan kinerja adalah keterlambatan pengesahan APBD, masih banyak koperasi yang tidak aktif, terbatasnya kemampuan koperasi, sumber daya manusia dan akses terhadap sumber daya produktif merupakan salah satu faktor penghambat pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu juga belum tersedianya data yang lengkap mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan. Pada Tahun 2019 capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah menunjukkan dalam kategori yang baik, namun belum sesuai dengan target yang diharapkan karena terjadi resionalisasi APBD-P dalam perjanjian kinerja tahun 2019 belum sesuai target. Maka berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian mengenai "ANALISA IMPLEMENTASI SAKIP DAN LAKIP

## TAHUN 2019 PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang tertuang di dalam latar belakang, maka akan ditarik rumusan masalah "Bagaimana Implementasi SAKIP dan LAKIP Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2019".

#### 1.3 Batasan Masalah

Untuk tidak memperluas pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang terfokus pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah Untuk mengetahui Implementasi Sakip dan Lakip Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2019.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1.5.1 Manfaat Ilmiah.

1. Sebagai pengaplikasian ilmu akuntansi yang didapati dari perkuliahan dengan

masalah yang terjadi dilapangan, terkhususnya mengenai Akuntansi Sektor

Publik.

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan

melakukan penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

3. Sebagai bahan referensi pembaca mengenai sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.5.2 Manfaat Praktis.

1. Sebagai gambaran untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Riau dalam menyempurnakan penerapan SAKIP dan

LAKIP berdasarkan peraturan berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima

BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

6

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

#### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data serta teknik dan metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil pembahasan dari bab sebelumnya.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Dalam suatu organisasi kesuksesan dan berlangsungnya pihak yang terkait dengan stakeholder. Pada saat ini perusahaan / organisasi mengelola hubungan dengan stakeholder memegang peranan sangat penting. Teori stakeholder mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Menurut (Freeman, 1984) stakeholder adalah setiap kelompok / individu yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi tujuan umum dari sebuah organisasi. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 2 dua yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Yang termasuk stakeholder primer adalah stakeholder pemilik, investor, karyawan maupun customer. Sedangkan yang termasuk stakeholder sekunder adalah pemerintah, masyarakat umum, dan lingkungan. Stakeholder merupakan sebuah prasa yang terbentuk dari dua buah kata stake yaitu kepentingan dan holder yaitu pemegang. Secara umum stakeholder merupakan individu atau organisasi yang mempunyai kepentingan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

#### 2.1.1 Organisasi Sektor Publik.

Menurut (Fitrinisa, 2019) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara bertahap dari

segi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Menurut (Bastian, 2010) organisasi sektor publik merupakan sebuah organisasi yang dana-nya berasal dan menggunakan dana masyarakat adapun organisasi tersebut seperti organisasi pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan pendidikan, organisasi kesehatan dan tempat ibadah, sedangkan menurut (Yusuf, 2021) organisasi sektor publik berbeda dan unik, dikarenakan dikelola untuk tidak mencari laba finansial, kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan, keputusan terkait kebijakan didasarkan pada konsesus.

Menurut (Mardiasmo, 2018) saat ini organisasi sektor publik sedang menghadapi tekanan untuk lebih efesien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan, pergerakan organisasi sektor publik dalam lingkungan yang sangat kompleks. Adapun faktorfaktor yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi meliputi faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultur dan faktor demografi.

- a. Faktor Ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik, sebagai berikut:
- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Pertumbuhan pendapatan perkapita
- 3) Tingkat inflasi
- 4) Struktur produksi
- 5) Arus modal dalam negeri
- 6) Tenaga kerja
- 7) Cadangan devisa
- 8) Nilai tukar mata uang

9)	Teknologi
10)	Infrastruktur
11)	Sektor informal
12)	Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
13)	Sektor informal
b. ]	Faktor Politik yang mempengaruhi sektor publik, antara lain:
1)	Hubungan antar negara dan masyarakat.
2)	Legitimasi pemerintah
3)	Rezim yang berkuasa
4)	Elit politik dan massa
5)	Ideologi negara
6)	Jaringan internasional
7)	Kelembagaan
c. ]	Faktor Kultural. yang mempengaruhi organisasi sektor publik, antara lain:
1)	Keragaman suku, agama, ras, bahasa dan budaya
2)	Sistem nilai di masyarakat
3)	Historis
4)	Sosiologi masyarakat
5)	Karakteristik masyarakat
6)	Tingkat pendidikan
<b>d.</b> ]	Faktor Demografi. yang mempengaruhi organisasi sektor publik, antara lain:
1)	Pertumbuhan penduduk

2) Struktur usia penduduk

#### 3) Migrasi

#### 4) Tingkat kesehatan

Menurut (Yusuf, 2021) organisasi sektor publik tercipta dan dikelola tidak untuk tujuan mencari laba, transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan organisasi sektor publik berbeda dengan perusahaan komersial yang mencari laba. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan (Wirdhana, 2020) bahwa tujuan utama organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan publik bukan untuk memaksimumkan laba, seperti : kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Meskipun organisasi sektor publik tidak memiliki tujuan finansial, seperti upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tujuan finansial dari organisasi sektor publik.

Menurut (Fitrinisa, 2019) sumber pendanaan organisasi sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik negara, hutang luar negeri pemerintahan, obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perudangan yang telah berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2018) bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik kepada masyarakat adalah manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat atas sumber dana yang telah digunakan dalam upaya pemberian layanan publik berasal dari masyarakat. Organisasi sektor publik memiliki struktur yang bersifat birokratis, kaku, dan hirarkies. Sistem kas merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik. Menurut (Bastian, 2019) organisasi sektor publik melakukan penyusunan anggaran bersama masyarakat dalam perencanaan

program. Pembulikasian penurunan program publik bertujuan untuk dikritis dan diskusikan oleh masyarakat yang akhirnya disahkan oleh masyarakat di DPR,DPD, dan DPRD.

#### 2.1.2 Akuntabilitas Publik.

#### 2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Publik.

Menurut (Sarimilia, 2021) akuntabilitas publik bertujuan untuk memberikan informasi berupa aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak memiliki kepentingan dalam laporan tersebut. Dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang diatur mengamanatkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), kemudian dalam paraturan presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Menurut (Yusuf, 2021) akuntabilitas merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk itu diperlukan pertanggungjawaban dari aparatur pemerintah atas seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik, akuntabilitas publik menjadi sebuah kewajiban para pemegang amanat dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan melakukan pengungkapan dari seluruh aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada hak dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut.

#### 2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas.

Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus terpenuhi oleh organisasi sektor publik, adapun sebagai berikut :

- 1) Akuntansi kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Dalam hal ini penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kulusi merupakan bentuk dari akuntabilitas kejujuran.
- 2) Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses berhubungan dengan apakah pelaksanaan tugas dalam kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur yang baik. Dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan izin lain diluar yang telah diterapkan merupakan bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan dalam akuntabilitas proses dan sumber-sumber inefesiensi dan pemborosan yang menjadi penyebab mahalnya pelayanan publik dan lamanya pelayanan. Pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses.
- 3) Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program merupakan programprogram organisasi yang diharapkan memiliki mutu untuk mendukung strategi dalam pencapaian visi dan misi dari tujuan organisasi, tujuan tersebut dapat dicapai dan juga mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan. Lembaga publik diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dengan pertimbangan dampak dimasa depan.
- 5) Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas Finansial merupakan bentuk tanggungjawab lembaga publik dalam menggunakan (*public money*) dana publik secara ekonomis baik efesien dan efektif dan tidak ada kebocoran dana atau kebocoran serta korupsi.

#### 2.1.2.3 Bentuk Akuntabilitas.

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntansi publik dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu :

1) Akuntabilitas Vertikal. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk tanggungjawab atas pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi. Seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kemudian pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal. Akuntabilitas Horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

#### 2.1.2.4 Sifat Akuntabilitas.

Menurut (Wirdhana, 2020) akuntabilitas berhubungan erat antara pemegang kendali dan yang mengatur entitas terhadap pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan pihak ketiga yang accountable dalam memberikan penjelasan dan alasan masuk akal mengenai keseluruhan kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang di peroleh dari pelaksanaan suatu tugas dari pelaksanaan dari suatu tujuan tertentu.

Dibutuhkan pihak ketiga yang accoutable dalam memberikan penjelasan dan alasan masuk akal mengenai keseluruhan kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha akal mengenai keseluruhan kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh dari pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Akuntabilitas pemerintahan dalam penyelenggaraan-nya tidak dapat dikenali tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber dana dan sumber daya masyarakat dengan penggunaannya. Berdasarkan (American Accounting Association) akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif yang dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Sumber Daya Finansial
- 2) Patuh terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi.
- 3) Efesiensi dan ekonomis-nya sebuah kegiatan

Adapun lima tahapan akuntabilitas berdasarkan perpektif fungsional:

- 1) *Probity And Legality Accountability*. Hal ini berhubungan antara pertanggungjawaban penggunaan dan kesesuaian anggaran yang disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Process Accountability*. Hal ini menggunakan proses, prosedur dan ukuran-ukuran untuk melaksanakan kegiatan (*planning allocation and managing*).
- 3) *Performace Accountabilty*. Melihat kegiatan yang dilakukan apakah sudah efesien (*Efficient and Economy*).
- 4) *Program Accountabilty*. Menyoroti penetapan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*Outcomes and effectiveness*).
- 5) *Policy Accountabilty*. Merupakan tahap pemilihan berbagai kebijakan yang ditetapkan atau tidak (*value*).

#### 2.1.2.5 Ciri-ciri Pemerintah Yang Akuntabel.

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas dijelaskan sebagai konsep yang berhubungan dengan standar eksternal untuk menetukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar yang merupakan sumber akuntabilitas untuk memotivasi dan mendorong aparat bekerja lebih keras. Berikut merupakan penilaian objektif masyarakat luar yang menentukan (accountable) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kemampuan dalam menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat kepada masyarakat.
- 2) Kemampuan pemberian pelayanan yang memuaskan terhadap publik
- 3) Kemampuan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan dari setiap kebijakan publik secara proporsional
- 4) Kemampuan memberi ruang untuk masyarakat dalam melibatkan proses pembangunan dan pemerintahan.
- 5) Menilai kinerja pemerintah dengan adanya sasaran bagi publik. Melalui pertanggungjawaban publik masyarakat untuk menilai derajat pencapaian, pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

#### 2.1.2.6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut (Yusuf, 2021) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan bentuk kewajiban dari sebuah instansi dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dapat terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan beranjak dari sistem yang mengandung asas-asas umum penyelenggaraan negara.
- 2) Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berhubungan pada pencapaian, visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 4) Jujur, transparan, objektif, dan akurat.
- 5) Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 2.1.3 Kinerja.

#### 2.1.3.1 Pengertian Kinerja.

Menurut (Yusuf, 2021) kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya secara kualitas dan kuantitas. Kinerja memiliki banyak artian yang dapat diartikan sebagai gambaran atas tingkat pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan untuk mewujudkan sasaran,tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis.

Menurut (Fitrinisa, 2019) kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi. Sasaran, saran dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan bagian organisasi karyawan. Menurut (Mahsun, 2014) dapat diketahui sebuah kinerja dari individu yang mempunyai

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dan berupa tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seseorang atau individu tanpa adanya tujuan dan target kinerja tidak mungkin dapat dicapai karena tidak adanya tolak ukurnya.

#### 2.1.3.2 Pengukuran Kinerja.

Menurut (Yusuf, 2021) pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai efesiensi penggunaan sumber daya, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan serta menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja merupakan sebuah metode yang digunakan sebagian penilaian pencapaian pelaksanaaan kegiatan berdasarkan tujuan.

Menurut (Fitrinisa, 2019) tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik membantu manajer publik dalam pencapaian suatu strategi dengan alat ukur financial dan nonfinancial. Pengukuran kinerja sektor dilakukan dalam rangka pemenuhan tiga tujuan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### 2.1.3.3 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja.

Menurut (Mardiasmo, 2018) tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum adalah sebagai berikut :

1) Mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik

- 2) Mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang dengan tujuan untuk dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi
- 3) Mengakomodasikan pemahaman perubahan kepentingan manajer level bawah dan menengah dan motivasi dalam mencapai goal conguerance
- 4) Sebagai alat dalam mencapai kepuasan melalui pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

Tujuan utama dari sistem pengukuran kinerja sebenarnya adalah untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari adanya pengukuran kinerja keuangan adalah untuk melihat apakah target yang dicapai organisasi hasilnya baik.

#### 2.1.3.4 Manfaat Pengukuran Kinerja.

Menurut (Fitrinisa, 2019) beberapa indikator keuangan dapat dijadikan pengukuran untuk kinerja, tujuan dalam pengukuran ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana tingkat kinerja atau keberhasilan sebuah management organisasi di dalam pengelolaan usahanya. Bahan penilaian kinerja manjemen dalam mengelola usaha dalam waktu tetentu merupakan manfaat dari adanya pengukuran kinerja.

Menurut (Mardiasmo, 2018) adapun manfaat pengukuran kinerja, yaitu :

- 1) Memberikan pemahaman tentang pengukuran kinerja dalam menilai kinerja manajemen
- 2) Memberikan arah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Sebagai monitoring dan evaluasi dalam pencapaian kinerja dan sebagai pembanding dengan target kinerja, serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai pedoman dalam memberikan hukuman dan penghargaan secara objektif
- 5) Sebagai alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan untuk memperbaiki kinerja organisasi

- 6) Membantu dalam indektifikasi terhadap kepuasan pelanggan apakah sudah terpenuhi
- 7) Pemahaman dalam proses kegiatan instansi pemerintahan
- 8) Membantu memastikan dalam pengambilan keputusan secara objektif

#### 2.1.3.5 Informasi Dalam Pengukuran Kinerja.

Menurut (Wirdhana, 2020) informasi yang digunakan dalam proses pengukuran kinerja adalah sebagai beikut :

- 1) Informasi Finansial. Dalam hal ini pengukuran kinerja didasari pada anggaran yang telah dibuat, pengukuran yang dilakukan dengan cara menganalisis selisih atau perbedaan (analisis varians) antara kinerja actual yang telah ditetapkan.
- 2) Informasi Nonfinancial. Tolak ukur lainnya dalam pengukuran kinerja adalah dengan cara non finansial, informasi diyakini dapat menambah kualitas proses dalam pengendalian manajemen. (*Balance Score Card*) pada saat ini dikembangkan sebagai teknik pengukuran kinerja komprehensif oleh berbagai organisasi, diantara (*balace score card*) dengan (*balance score kinerja*) diukur tidak hanya sebatas aspek finansial-nya saja tetapi juga nonfinansial.

#### 2.1.3.6 Komponen Rencana Kerja.

Menurut (Wirdhana, 2020) ada beberapa informasi yang dimuat dalam komponen rencana kerja, seperti sasaran yang ingin dicapai, program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana pencapaiannya. Keterangan yang menjelaskan keterkaitan dengan sasaran pun dimuat didalamya. Kebijakan dengan program, dan keterkaitan dengan sasaran pun dimuat didalamnya. Kebijakan dengan program dan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja sebagai berikut:

 Sasaran. Dalam rencana kerja dimaksud dengan sasaran adalah bagaimana sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra. Dan kemudian sasaran akan diindentifikasi yang mana akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dengan indikator tingkat capaiannya.

- 2) Program. Program-program yang berada pada lingkup kebijakan tertentu merupakan program-program yang ditetapkan dimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi.kemudian program-program yang akan dipakai pada tahun yang bersangkutan akan diindentifikasi dan ditetapkan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Kegiatan. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
- 4) Indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan merupakan pengambaran tingkat pencapaian secara kualitatif dan kuantitatif mengenai suatu suatu kegiatan yang telah ditetapkan

### 2.1.3.7 Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut (Fitrinisa, 2019) definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala lembaga adminstrasi negara No. 239/IX/6/8/2003 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan program ditetapkan, pada dasar-nya pengukuran kinerja harus mencangkup kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja instansi pemerintah dalam stakeholder sektor publik, stakeholder ekternal, masyarakat sebagai pengguna jasa, masyarakat sebagai pembayar pajak organisasi sosial yang menggunakan pelayanan publik input sebagai aktivitas organisasi stakeholder internal lembaga negara negara kabinet (MPR, DPR/DPRD), kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur, bupati, direktur, pegawai pemerintah).

## 2.1.4 Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 2.1.4.1 Pengertian SAKIP.

Menurut (Yusuf, 2021) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur secara sistematik yang dirancang untuk tujuan menetapkan dan pengukuran pengkasifikasian, pengumpulan data, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah guna meningkatkan dan mempertanggungjawabakan kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) didefinisikan sebagai sistem pembentuk siklus yang prosesnya dimulai dari penetapan visi dan misi, tujuan dan saran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik organisasi, kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kinerja tahunan, kemudian akan dilakukan penetapan pengukuran kinerja, dan dilakukannya pengumpulan data dalam rangka menilai kinerja, menganalisis, meriviu dan melaporkan kinerja, perbaikan kinerja organisasi pada priode berikutnya dengan menggunakan data.

### 2.1.4.2 Sasaran SAKIP.

Menurut (Yusuf, 2021) adapun sasaran dalam SAKIP sebagai berikut :

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang dapat beroperasi secara efesien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat secara akuntabel.
- 2) Terwujudnya transparansi lingkungan instansi pemerintah
- 3) Partisipasi masyarakat terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional
- 4) Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terpelihara.

## 2.1.5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

# 2.1.5.1 Pengertian LAKIP.

Menurut (Fitrinisa, 2019) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang disusun dan disampaikan secara sistematik dalam perwujudan AKIP. Bagi pengambil keputusan Lakip harus menyajikan data dan informasi relevan dimaksudkan dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara keseluruhan.

Sedangkan menurut (Yusuf, 2021) menyiapkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan lembaga merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja di tunjukan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

#### 2.1.5.2 Dasar Hukum LAKIP.

Menurut (Yusuf, 2021) adapun dasar hukum yang digunakan dalam Lakip, sebagai berikut :

- 1) Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1) mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- 2) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/ 1998 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- 3) Undang-undang nomor 28 tahun 1999 pasal 3 mengenai penyelengaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- 4) Instruksi presiden nomor 7 Tahun 1999 mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 5) Keputusan kepala lembaga admistrasi negara nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 mengenai pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- 6) Peraturan menteri negara dan pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 mengenai pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1.5.3 Unsur-unsur Dalam LAKIP.

Menurut (Sarimilia, 2021), adapun unsur-unsur yang tercantum dalam Lakip:

- 1) Pendahuluan
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- 3) Akuntabilitas Kinerja
- 4) Rencana Strategis, formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 5) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 6) Formulir Perjanjian Kinerja
- 7) Penutup

#### 2.1.5.4 Manfaat LAKIP.

Menurut (Fitrinisa, 2019) manfaat lakip dapat diketahui dengan adanya pelaksanaan reformasi, adapun manfaat tersebut sebagai berikut :

- 1) Untuk mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dan didasari peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Menjadikan instansi pemerintah secara akuntabel untuk dapat beroperasi secara efesien, efektif dan rensponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Sebagai masukan dan umpan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal meningkatkan kinerja intansi pemerintah.
- 4) Kepercayaan masyarakat kepada masyarakat yang terpelihara.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 21 Kerangka Pemikiran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Permenpan RB. No. 12 Tahun 2015 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (SAKIP) (LAKIP) **Analisis** Kesimpulan

Sumber: Kerangka pemikiran yang disesuaikan untuk penelitian (2021)

# 2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Yusuf, 2021) judul penelitian ini adalah "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian kabupaten muna barat", jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian format Lakip Dinas Komunikasi

Informatika Statistik dan Persandian kabupaten muna barat dengan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010. Dari sepuluh unsur dalam peraturan, terdapat lima 5 unsur yang belum sesuai dengan format pada peraturan. Dapat disimpulkan Lakip Dinas Kominfo Kabupaten Muna Barat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010.

- 2. (Wirdhana, 2020) dengan judul penelitian "Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) pada dinas komunikasi dan informatika kota Tanjungpinang", jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini adalah Sakip dan Lakip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan perpres No 29 Tahun 2014 dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
- 3. (Fitrinisa, 2019) dengan judul penelitian "Analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau" jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder, hasil penelitian ini adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kepulauan Riau tahun anggaran 2018 sudah berhasil melaksanakan program dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai.

4. (Almquist et al., 2013) dengan judul penelitian "Tata Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik" jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder, hasil penelitian ini adalah 1. Mengubah tata kelola dan akuntabilitas melalui pengukuran kinerja: kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih luas sebagai besar sejalan dengan otonomi yang lebih besar. Akibat reformasi akuntabilitas publik menjadi independen berdasarkan pencapaian proses dan keluaran. 2) Sistem pengukuran kinerja untuk akuntabilitas dan pengendalian internal mencapai kinerja yang ditargetkan organisasi merupakan tujuan dari sistem kelola, instrument pengukuran kinerja harus memberikan informasi kepada pemangku kepentingan internal untuk pengendalian internal.
3) Akuntabilitas yang cerdas dan saran nilai dalam konteks jaringan: pengawasan yang canggih dan hasil yang sangat transparan. 4) tentang non-

netralitas hubungan akuntabilitas : akuntabilitas dipengaruhi pandangan

akuntor dan akuntan

5. (Busuioc & Lodge, 2016) dengan judul penelitian "Memprediksi Akuntabilitas Sektor Publik: dari agensi ke forum" jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder, hasil penelitian ini adalah menunjukkan kurangnya kemauan politik untuk mendukung tindakan kurangnya kemauan politik menjadi ekternal yang membatasi untuk tugas-tugas dieksekusi, untuk memberikan blok bangunan untuk teori akuntabilitas sektor publik dengan kapasitas prediksi yang ditingkatkan. Ini sudah selesai dengan menghubungkan studi deskriptif tentang karakter multifaset akuntabilitas dengan keagenan dan control.

#### **BAB III**

#### METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sebagaimna menurut (Sugiyono, 2012) metode kualitatif dapat berfungsi untuk menggambarkan dan memahami makna dibalik data-data yang tampak. Lebih lanjut (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa metode kualitatif akan cenderung mengarahkan penelitian pada jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang dapat menggambarkan atau menjelaskan objek penelitian yang diteliti dengan tidak menggunakan angka, sehingga penjelasannya lebih lengkap.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam ini dibedakan menjadi jenis data yang digunakan dalam ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang didapati dari hasil wawancara informan yang

berkaitan langsung dengan format penyusunan Sakip dan Lakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

### 2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015). Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan tertulis yang sudah tersedia melalui dokumentasi atau laporan-laporan yang terkait dalam penyusunan Sakip dan Lakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yakni :

#### 1. Observasi.

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian observasi ataupun pengamatan yang terkait permasalahan penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

#### 2. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah dengan melakukan pencatatan atau pun melakukan photo copy mengenai data yang diperlukan selama melakukan penelitian.

#### 3. Wawancara.

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihakpihak yang terkait langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian wawancara akan ditujukan kepada pegawai di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

# 4. Studi Pustaka.

Studi pustaka menurut (Diana, 2014) merupakan pendalaman materi dengan cara interprestasi dari informasi yang sudah ada, teknik ini penulis gunakan untuk tujuan mendapat referensi mengenai penelitian "Analisis Implementasi Sakip dan Lakip Tahun 2019 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

## 3.4 Teknik Pengolahan Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitik-beratkan pada hal-hal yang dianggap penting. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data mentah yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.
- 2) Penyajian data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

3) Penarikan Kesimpulan. merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis melalui proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk kategorisasi data.

# 3.5 Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti untuk penyusunan skripsi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Jadwal Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	Feb 2020				Mar 2020				Juni				Juli 2020				Agus 2021				Sept				Oktober			
										2020																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																							33					
2	Penyusuran Iaporan							7												(4)				313					
3	Seminar proposal																												
4	Riset Ke Dinas Koperasi																							90			20		
5	Pentouatan skripsi dan Sidang Skripsi																eve.												-17

Sumber: Penulis, 2021

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. (2010). Akuntansi Sektor Publik (ketiga).
- Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. *Jakarta: Erlangga*.
- Busuioc, E. M., & Lodge, M. (2016). The Reputational Basis of Public Accountability. *Governance*, 29(2), 247–263. https://doi.org/10.1111/gove.12161
- Diana, C. (2014). Metodologi Penelitian.
- Fitrinisa, G. (2019). Analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laki) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
- Freeman, R. . (1984). "Strategic Management": A Stakeholder Approach, Boston, Pitman.
- Ittner, C. K. . (2004). *Implementing performance measurement innovations:* evidence from government. Accounting, Organizations.
- Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (2018th ed.). ANDI.
- Sarimilia, R. (2021). akuntabilitas publik.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kkualitatif.
- Sujarweni, W. V. (2015). Sistem Akuntabilitas.
- Wijaya, Citra H Anthonius dan Akbar, R. (2013). The Influence of Information,
  Organizational Objective and Targets, and External Pressure Toward The
  Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. 28, 62–83.
- Wirdhana, H. M. (2020). Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) pada dinas komunikasi dan informatika kota tanjungpinang.
- Yusuf, S. (2021). ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUNA BARAT. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5(2).
- Peraturan Gurbernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Website

http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id (diakses pada 19 Juli 2021).

https://doi.org/10.32832/neraca.v14i1.2316 (diakses pada 19 Juli 2021).

### **CURICULUM VITAE**



Nama : Raja Risa Elvira

Nim : 17622088

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah Nomor Hp : 0882-7098-4315

Email : rajarisaelvira01@gmail.com

Alamat : Jl. Kampung Wonosari Km : 7 No. 100

# Nama Kedua Orang Tua

A. Ayah : Alm. Raja Muhammad Aziz

B. Ibu : Sofiah

# Riwayat Pendidikan

A. TK : YAYASAN MADRASAH ISLAMIYAH RAUDHATUL

ATHFAL

B. SD :SDN 011 KECAMATAN BUKIT BESTARI

C. SMP :SMP NEGERI 2 TANJUNGPINANG

D. SMA :SMA NEGERI 4 TANJUNGPINANG

E. S1 :STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG